

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2010-2014  
(STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG)**

**RAHMAWATI**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

**ABSTRAKSI**

Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi tahun 2010-2014 studi penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Implementasi yang dimaksud yaitu mengetahui pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi implementator, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Metode penelitian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data utama adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan data sekunder. Pencarian informan dilakukan dengan sistem *purposive sampling* (pengambilan dengan sengaja) dan *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian). Teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen.

Kebijakan beasiswa Bidikmisi merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang menunjuk perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai pelaksananya. Kebijakan ini memiliki tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan ini memiliki satu pedoman yang sama dengan segala ketentuan dan aturannya. Namun dalam praktiknya, Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang memiliki perbedaan dalam pengelolaan.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mengatur lebih jelas kepada perguruan tinggi sehingga prinsip Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu dari kebijakan ini dapat tercapai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah, Beasiswa Bidikmisi

**POLICY IMPLEMENTATION OF BIDIKMISI SCHOLARSHIP 2010-2014  
(STUDY RESEARCH IN DIPONEGORO UNIVERSITY AND SEMARANG STATE  
UNIVERSITY)**

**RAHMAWATI**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

**ABSTRACT**

Policy implementation of Bidikmisi scholarship 2010-2014 study research at the Diponegoro University and Semarang State University has the objective to investigate the implementation of the policy at the Diponegoro University and Semarang State University. The implementation is to know Bidikmisi scholarship policy implementation based on the theory of policy implementation by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn with six indicators, which is standards and policy goals, resources, communications, disposition implementer, characteristics enforcement agencies, and social environment, economic and political.

The method of answering the problem in this research is a qualitative deskriptif main data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary data and secondary data. Search informants with purposive sampling system (making intentional) and accidental sampling (sampling by accident when he met at the study site). Collection techniques using interviews, observation, and documents.

Bidikmisi scholarship policy is a policy of the central government through the Ministry of Research, Technology, and Higher Education (formerly the Ministry of Education and Culture) which refers to public and private universities to do the job. This policy has a major goal is to break the chain of poverty by providing opportunities high achieving students who have financial limitations for education in college. This policy has the same guidelines with all rules and regulations. However, in practice, Diponegoro University and Semarang State University had differences in management.

Results from this study is expected to provide benefits for the government to regulate clearer to the college so that the principle such as right on target, right number, and timely of these policies can be achieved.

Keywords: Implementation of Government Policy, Bidikmisi Scholarship

## **1. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan masalah utama bangsa Indonesia saat ini. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satunya melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat pokok dan penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah baik dalam sistem maupun pembiayaan. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2010 meluncurkan Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Bidikmisi merupakan

bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini disusun untuk memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik yang memadai untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pada awal kemunculannya tahun 2010, besaran beasiswa Bidikmisi yaitu Rp 5.000.000,00 per semester dengan fokus utama pada biaya hidup. Pada tahun berikutnya fasilitas yang diberikan berkembang . Program Bidikmisi memberikan fasilitas beasiswa berupa bantuan biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah Rp 6.000.000,00 per semester dengan rincian Rp 600.000,00 per bulan untuk biaya hidup dan Rp 400.000,00 per bulan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan. Besaran biaya tersebut sama di setiap tahun penyelenggaraan beasiswa. Selain biaya diatas, mahasiswa Bidikmisi juga dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill*. Pelatihan yang diberikan diantaranya pelatihan kewirausahaan, *ESQ*, pelatihan pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan pelatihan kemampuan bahasa Inggris.

Penyelenggara program beasiswa Bidikmisi di regional Jawa Tengah diantaranya adalah Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Terhitung sejak tahun 2010, Undip merupakan bagian dari penyelenggara program Bidikmisi. Berikut adalah data jumlah Mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro berdasarkan jenis kelamin tahun 2010-2014:

**Tabel 1.1.**  
**Data Jumlah Mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro Tahun 2010-2014**

No	Tahun Angkatan	Jumlah
1	2010	225
2	2011	463
3	2012	800
4	2013	1100
5	2014	1201
<b>Jumlah</b>		3789

*Sumber: Universitas Diponegoro 2014*

Program beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro mengalami berkembang jumlah penerima secara signifikan. Pada Tabel 1.1. jelas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penerima beasiswa terus meningkat dari awal tahun 2010 berjumlah 225 mahasiswa menjadi 1.201 pada tahun 2014.

Universitas Negeri Semarang merupakan perguruan tinggi penyelenggara dengan kuota terbanyak, bahkan pada tahun 2013 Unnes merupakan penerima kuota terbesar di Indonesia. Berikut merupakan rincian data kuota beasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Semarang tahun 2010 hingga 2014:

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Semarang 2010-2014**

No	Tahun Angkatan	Jumlah
1	2010	389
2	2011	1425
3	2012	1750
4	2013	1850
5	2014	1925
<b>Jumlah</b>		7339

*Sumber :SIM Beasiswa Bidikmisi Unnes*

Data tabel di atas, jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Semarang mengalami jumlah yang signifikan dalam jumlah besar. Unnes merupakan perguruan

tinggi penyelenggara dengan kuota terbanyak, bahkan pada tahun 2013 Unnes merupakan penerima kuota terbesar di Indonesia. Berdasarkan data tabel di atas, jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Semarang mengalami kenaikan jumlah yang signifikan dalam jumlah besar. Selama kurun waktu lima tahun jumlah penerima beasiswa Bidikmisi Unnes meningkat dari 389 menjadi 1925, hampir tiga kali lipat dari jumlah awal.

Persyaratan mahasiswa penerima Bidikmisi berkembang setiap tahunnya. Sejak tahun 2010 hingga 2014, secara umum persyaratan dan kriteria mahasiswa Bidikmisi adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang akan lulus pada tahun penyelenggaraan.
2. Lulusan tahun sebelumnya yang bukan penerima BIDIKMISI dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi.
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun.
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria :
  - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
  - b. Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya
  - c. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp 3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan nonformal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir.
  - d. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 750.000,00 setiap bulannya.

---

<sup>1</sup> Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 2014

5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi Kepala Sekolah
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
    1. Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
    2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
    3. Seleksi Mandiri di 1 (satu) PTN
  - b. PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS

Mahasiswa penerima Bidikmisi Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang merupakan komunitas penerima beasiswa terbesar. Tahun 2014 di Universitas Diponegoro, jumlah penerima mencapai 3789 mahasiswa. Di Universitas Negeri Semarang sendiri sesuai dengan data yang dihimpun oleh SIM Bidikmisi Unnes berjumlah 7339 mahasiswa. Alokasi besaran biaya yang berikan pemerintah kepada penerima beasiswa Bidikmisi yaitu Rp1.000.000,00 per bulan dengan rincian maksimal 40% untuk biaya pendidikan dan 60% untuk biaya hidup mahasiswa.

Perbedaan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang merupakan kajian yang perlu diperhatikan. Penentuan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi ditentukan oleh<sup>2</sup>:

- a. Tingkat perekonomian rata-rata mahasiswa perguruan tinggi
- b. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Bidikmisi
- c. Laporan penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi tahun sebelumnya.

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Faktor-faktor inilah yang mendorong peneliti untuk mengathui pelaksanaan beasiswa Bidikmisi di Undip dan Unnes. Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi sudah menjelaskan secara detail aturan penyelenggaraan kebijakan. Program beasiswa Bidikmisi mempunyai tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus turut berupaya mengatasi masalah kemiskinan ini salah satunya dengan menyelenggarakan kebijakan beasiswa Bidikmisi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah upaya bersama dengan melibatkan pelaksana, masyarakat dan khususnya mahasiswa penerima beasiswa.

Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu 2010 hingga 2014 dimana merupakan awal dilaksanakan program beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 – 2014?

## **3. Teori dan Metode**

### **2.1. Teori**

Pada penelitian Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi tahun 2010-2014 studi penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang ini fokus penelitian berada pada teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,

komunikasi, disposisi implementator, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik<sup>3</sup>.

## 2.2. Metode

Pada penelitian tentang Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi tahun 2010-2014 studi penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah dua perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Kedua universitas tersebut dipilih karena merupakan universitas pelaksana pertama beasiswa Bidikmisi sejak tahun 2010. Selain itu, kedua universitas tersebut merupakan universitas besar dengan jumlah kuota beasiswa Bidikmisi yang cukup tinggi di Indonesia.

Subjek penelitian diantaranya adalah pihak pengelola beasiswa Bidikmisi di Undip dan Unnes, dan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Teknik pengambilan informan dengan sistem *purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) untuk memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Disamping itu juga peneliti juga menggunakan sistem *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian)<sup>4</sup>.

Jenis data yang disajikan dalam bentuk numerik maupun dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau simbol-simbol yang menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan, atau peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan beasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer

---

<sup>3</sup> Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta. PT. Buku Kita Hlm. 158-159

<sup>4</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA: Bandung. Hal: 28

adalah data yang diperoleh secara langsung oleh objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan beasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang yaitu data hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh studi pustaka atau data yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumen dan observasi.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian disusun membentuk penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data yang sesuai. Kemudian setelah dilakukan proses klasifikasi, dilakukan analisis data. Setelah itu melakukan analisa data mendalam sesuai dengan kerangka penelitian. Setelah dilakukan analisa, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan hasil penelitian.

#### **4. Hasil Penelitian**

##### **4.1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi dilaksanakan dengan standar dan sasaran yang sama yaitu dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dasar Hukum pelaksanaan beasiswa Bidikmisi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dikti.

Standar dan sasaran program implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang sudah

mendukung pelaksanaan kebijakan. Standar pelaksanaan dapat diwujudkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, namun dalam pedoman detail mengenai kegiatan seleksi calon penerima beasiswa perlu diatur lebih jelas sehingga tidak terjadi berbagai versi seleksi yang akan berdampak pada aspek Tepat Sasaran dalam prinsip pelaksanaan beasiswa Bidikmisi.

Proses seleksi calon penerima beasiswa Bidikmisi dilakukan oleh Kesma Undip bekerjasama dengan mahasiswa melalui BEM dan Kamadiksi. Segala bentuk ketentuan survey, mekanisme, pembagian dana dan pembagian wilayah survei diatur oleh mahasiswa sebagai pelaksana dengan persetujuan Kesma. Dalam hal ini peran tersentral pada mahasiswa.

Proses seleksi dilakukan oleh mahasiswa Bidikmisi yang lebih senior (angkatan sebelumnya) dengan mekanisme yang ditentukan oleh Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi Unnes. Peran tersentral pada pengelola beasiswa Bidikmisi dengan melibatkan mahasiswa sebagai surveyor. Ketentuan, mekanisme, dana dan pembagian wilayah survei diatur oleh Tim Pengelola Bidikmisi.

#### **4.2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dari sisi kualitas SDM Bagian Kesejahteraan Mahasiswa selaku pengelola sudah mencukupi. Dari segi pendidikan, dari 11 staff Bagian Kesejahteraan Mahasiswa, 4 staff adalah lulusan S2, 3 staff lulusan S1, dan 4 staff lulusan D3.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang dibentuk dari berbagai elemen di Universitas Negeri Semarang sehingga memperkaya kualitas SDM dalam pelaksanaan

beasiswa Bidikmisi. Tim Pengelola Bidikmisi Unnes terdiri dari berbagai elemen yaitu dosen, karyawan, serta mahasiswa dalam *Bidikmisi Scholarship Community* (BSC).

Anggaran dana beasiswa Bidikmisi dikelola dengan baik oleh Dikti. Perguruan tinggi selaku pelaksana kebijakan tidak ikut serta dalam pengelolaan dana. Perguruan tinggi hanya mengelola mekanisme pencairan dana dan pengelolaan dana pendidikan yang disalurkan oleh Dikti melalui rekening perguruan tinggi. Alokasi anggaran dari pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami tren peningkatan di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan upaya pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas beasiswa Bidikmisi di seluruh perguruan tinggi.

#### **4.3. Komunikasi**

Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi selama 5 tahun, sudah terjalin komunikasi yang baik dari semua pihak. Kesma Undip sebagai pelaksana teknis sudah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kemahasiswaan tingkat fakultas dan mahasiswa. Komunikasi tersebut terjalin agar tercipta suatu komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat agar tercipta pelaksanaan kebijakan yang tidak tumpang tindih. Namun, hambatan dalam komunikasi ini masih ditemukan khususnya yaitu komunikasi terhadap kelompok sasaran. Hambatan ini berkaitan dengan pola komunikasi antara pengelola dengan paguyuban mahasiswa Bidikmisi (Kamadiksi), BEM, dan koordinator fakultas mahasiswa Bidikmisi yang dibentuk pada awal penerimaan beasiswa Bidikmisi. Kelompok mahasiswa tersebut memiliki peran yang tidak teratur dan secara individualis menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan informasi. Hal ini yang sering menyebabkan informasi ganda bagi mahasiswa Bidikmisi.

Komunikasi antar pengelola dilaksanakan dengan baik. Komunikasi antar organisasi antara Tim Pengelola dan Kesma Unnes terjalin sangat baik. Sebagai personil tim pengelola adalah staff kesma Unnes. Komunikasi dengan kelompok sasaran terjalin sangat baik melalui BSC. BSC terbentuk sebagai jembatan penghubung antara pengelola dengan kelompok sasaran. Sistem yang terbentuk dalam BSC telah terstruktur dan terpusat sebagai wadah komunikasi mahasiswa Bidikmisi Unnes tanpa terkecuali.

#### **4.4.Karakteristik Agen Pelaksana**

Struktur pelaksana beasiswa Bidikmisi selama kurun waktu 5 tahun tidak terjadi banyak perubahan. Pelaksana beasiswa Bidikmisi masih tetap Bagian Kesejahteraan Mahasiswa di bawah Pembantu Rektor III. Pergantian personil pelaksana dalam Bidang Kesejahteraan Mahasiswa mengikuti rotasi PNS yang terjadi di lingkungan Undip. Struktur pelaksanaannya tidak banyak berubah. Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi Unnes ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Secara struktural Tim Pengelola Bidikmisi tetap sama setiap tahunnya.

*Standart Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan beasiswa Bidikmisi dalam kurun waktu lima tahun masih sama. SOP ini tertuang dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

#### **4.5.Disposisi Implementator**

Komitmen pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan beasiswa Bidikmisi, Kesejahteraan Mahasiswa sangat mendukung pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh Dikti. Sikap yang ditunjukkan pelaksana kebijakan sudah sangat baik

terhadap sasaran kebijakan. Sikap terbuka ditunjukkan dengan membuka pelayanan mahasiswa.

Disposisi atau sikap pelaksana sudah mendukung dalam implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Semarang. Hal ini terlihat dari selesainya pelaksanaan yang sesuai dengan Pedoman yang sudah ditetapkan. Sikap terbuka ditunjukkan dengan membentuk website BSC sebagai media yang mewadahi seluruh mahasiswa Bidikmisi

#### **4.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan beasiswa Bidikmisi di Undip dan Unnes kurang mendukung. Peran ini sangat terlihat dari proses seleksi mahasiswa Bidikmisi. Menurut beberapa surveyor beasiswa Bidikmisi Undip Unnes menyatakan banyaknya masyarakat yang menutup-nutupi keadaan ekonomi mahasiswa calon penerima Bidikmisi yang sebenarnya. Sebagian melakukan pemalsuan data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan keterangan palsu terkait kondisi ekonomi calon penerima.

Kondisi ekonomi dan politik perguruan tinggi dalam kaitannya pelaksanaan beasiswa Bidikmisi tidak memiliki pengaruh. Bidikmisi merupakan kebijakan nasional yang menunjuk perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan. Pengaruh kondisi ekonomi dan politik nasional lebih berpengaruh dalam kebijakan ini. Pergantian rezim pemerintah pusat dan kondisi ekonomi nasional mempengaruhi ketetapan dan ketentuan kebijakan beasiswa Bidikmisi. Sebagai contoh pada tahun ini 2014, terjadi pergantian pemerintahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi Kementrian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pergantian ini mempengaruhi kebijakan yang diambil khususnya Bidikmisi. Tahun 2016, kuota beasiswa Bidikmisi di setiap perguruan tinggi mengalami penurunan dratis. Hal tersebut tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tahun 2016 bahwa kuota beasiswa Bidikmisi adalah 20% dari jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Universitas Diponegoro untuk tahun 2016 memiliki kuota 670, sedangkan Unnes yang sebelumnya adalah perguruan tinggi dengan kuota terbanyak hanya memiliki kuota 625.

## **5. Kesimpulan**

Kebijakan Beasiswa Bidikmisi merupakan program yang memiliki tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan ini memiliki arti bahwa beasiswa Bidikmisi mampu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang sudah berupaya mencapai tujuan program utama dengan memberikan kesempatan untuk seluruh mahasiswa miskin berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Secara umum implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi selama kurun waktu 5 tahun di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima beasiswa Bidikmisi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di dua perguruan tinggi ini menunjukkan pengelolaan beasiswa Bidikmisi yang baik sesuai dengan kriteria dari

Dikti. Pertama, tingkat perekonomian rata-rata mahasiswa perguruan tinggi, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Bidikmisi, dan laporan penyelenggaraan beasiswa Bidikmisi tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro secara sistem masih kurang terorganisir dengan baik. Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi yang masih menjadi satu dengan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa menjadi penyebab sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan program dan tumpang tindih tupoksi. Selain itu, komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran masih kurang sehingga kurang berkoordinasi dengan baik. Secara sistem Universitas Negeri Semarang memiliki sistem yang lebih tertata. Tim Pengelola Khusus Beasiswa Bidikmisi dibentuk dari berbagai elemen pengajar, karyawan, dan ahli. Komunikasi antar pengelola dan kelompok sasaran juga terjadi secara efektif melalui *Bidikmisi Scholarship Community* (BSC).

## **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- D. Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta
- Rachmawati, Ika Kusdyah. 2004. *Manajemen, Konsep Dasar, dan Teori*. Malang: UMM Press.
- Salim, Agus 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (1996). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presisindo.

## **Karya Ilmiah**

Apriani, Laila Dona. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Depdikbud, *Pedoman Beasiswa Bidikmisi 2013*. diakses tanggal 17 April 2014

Rohmah, Eva Nur Laely. (2015). Persepsi Mahasiswa Bidikmisi Terhadap Harapan Masa Depan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro.(2014). *Profil Univeritas Diponegoro*. Semarang. Universitas Diponegoro

Universitas Negeri Semarang .(2014). *Profil Universitas Negeri Semarang*. Semarang. Universitas Negeri Semarang

## **Sumber dari Perundang-undangan:**

Pembukaan UUD 1945 dan Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 188/P/2016 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi Tahun Anggaran 2016 Universitas Negeri Semarang